

**ANALISIS BASIS EKONOMI, INVESTASI PEMERINTAH DAN  
PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**AFRIA NANDA  
1202774/2012**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

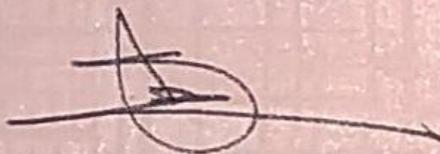
### ANALISIS BASIS EKONOMI, INVESTASI PEMERINTAH, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT

Nama : Afria Nanda  
BP/NIM : 2012 / 1202774  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Prodi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

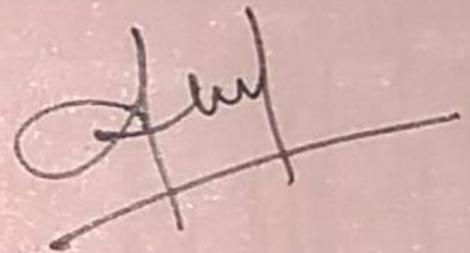
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



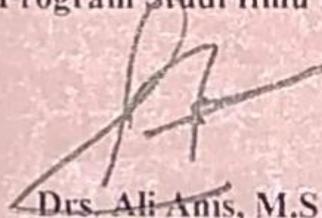
Prof. Dr. Syamsul Amar B, Ms  
NIP. 1957 1021 198601 1 001

Pembimbing II



Ariusni SE, MSi  
NIP. 1977 0309 200801 2 001

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, M.S  
NIP. 19591129 198602 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

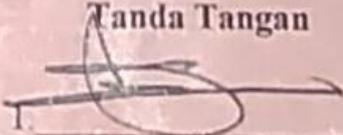
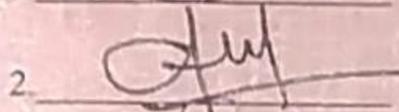
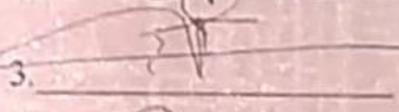
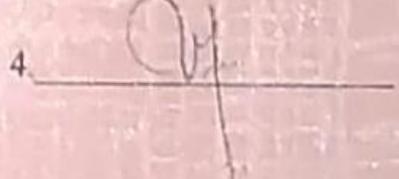
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

### ANALISIS BASIS EKONOMI, INVESTASI PEMERINTAH, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT

Nama : Afria Nanda  
NIM/TM : 1202774/2012  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Prof.Dr. Syamsul Amar B.Ms	1. 
2	Sekretaris	: Ariusni, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 
4	Anggota	: Mike Triani, SE, MM	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afria Nanda  
NIM/Thn. Masuk : 1202774/ 2012  
Tempat/Tgl Lahir : Kubang / 01 April 1992  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln.Garuda 129 Air Tawar Barat, Padang Utara  
No. HP/telp : 082387070069  
Judul Skripsi : Analisis Basis Ekonomi, Investasi Pemerintah, dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah, dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 01 Februari 2018  
Yang menyatakan...



**Afria Nanda**  
NIM : 1202774

## ABSTRAK

**Afria Nanda : Analisis Basis Ekonomi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.**

**2012/1202774 Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar, B,Ms dan Ibuk Ariusni, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh basis ekonomi, investasi pemerintah, pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini tergolong deskriptif dan asosiatif. Tempat dan waktu penelitian ini di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat pada November 2016. Variabel penelitian ini adalah basis ekonomi, investasi pemerintah, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan model panel. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, asumsi klasik dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Chow dan Hausman (2) Uji Asumsi Klasik (3) Regresi Panel (4) Koefisien Determinasi (5) Uji F (6) Uji t.

Hasil penelitian menunjukkan (1) basis ekonomi berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,1166 dan tidak signifikan ( $\text{prob}=0,3732$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat (2) investasi pemerintah berpengaruh negatif dengan koefisien sebesar -0,7627 dan signifikan ( $\text{prob}=0,0000$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota Sumatera Barat (3) basis ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh signifikan ( $\text{prob F-statistik}=0,0000$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah memperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana pendukung yang mempengaruhi perkembangan sektor basis, melakukan pemerataan terhadap investasi dan pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan kebijakan untuk merangsang laju pertumbuhan ekonomi agar masyarakat semakin sejahtera dan mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Sumatera Barat.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan pada ALLAH SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beriringan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini Berjudul “*Analisis Basis Ekonomi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat*”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar B,M.s selaku pembimbing I dan Ibuk Ariusni SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar B,M.S, selaku pembimbing I dan penasehat akademis yang telah memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ariusni SE, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dosen penguji skripsi yaitu Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, dan Ibu Mike Triani, SE, MM.
4. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati serta semua keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Ilmu Ekonomi angkatan 2012 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS...</b>	
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Hipotesis.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>38</b>
<b>B. Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>39</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>E. Variabel Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>F. Defenisi Operasional.....</b>	<b>40</b>

<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (PDRB) Tahun 2012-2016 .....	3
2. Analisis LQ Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016.....	6
3. Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016.....	10
4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 .....	13
5. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013-2016	53
6. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013-2016 .....	55
7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (PDRB) Tahun 2012-2016 .....	57
8. Jumlah Sektor Basis Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (PDRB) Tahun 2012-2016 .....	60
9. Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (PDRB) Tahun 2012-2016 .....	64
10. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (PDRB) Tahun 2012-2016 .....	68
11. Hasil Uji Chow.....	71
12. Hasil Uji Hausman .....	72
13. Hasil Uji Multikolinieritas .....	73
14. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	74
15. Hasil Hasil Estimasi Fixed Effect Model.....	75

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual Pengaruh Basis Ekonomi, Investasi Pemerintah Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Basis Ekonomi, Investasi, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016.....	87
2. Hasil Olahan Data Dengan Menggunakan Metode <i>Common Effect Model</i> ....	90
3. Hasil Olahan Data Dengan Menggunakan Metode <i>Fixed Effect Model</i> .....	91
4. Uji Chow .....	92
5. Hasil Olahan Data Dengan Menggunakan Metode <i>Random Effect Model</i> .....	93
6. Uji Hausman .....	94
7. Hasil Olahan Data Dengan Uji Asumsi Klasik .....	95
8. Tabel t .....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal dan teknologi yang digunakan berkembang. Tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan (Sukirno, 2002).

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang selalu diprioritaskan sebab adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya penambahan pendapatan perkapita. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi di berbagai bidang. Menurut kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2012).

Pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan sangat diharapkan oleh negara seperti Indonesia karena dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi perhatian lebih di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan mampu memberikan efek yang tinggi terhadap bidang-bidang yang lain sebab ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka pendapatan nasional suatu negara akan meningkat sehingga bisa di alokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perekonomian. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama suatu negara guna mensejahterakan penduduknya.

Pembangunan di Propinsi Sumatera Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari sembilan belas kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari usaha bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, disisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Pertumbuhan perekonomian daerah tergantung dari kondisi masing-masing daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat dapat diketahui dengan melihat indikator yang dapat mencerminkan seluruh kegiatan ekonomi yang

telah dilaksanakan melalui laju pertumbuhan PDRB untuk melihat keberhasilan pembangunan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto yang berarti akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun.

**Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (PDRB) Tahun 2012-2016 (dalam persen)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Kabupaten</b>					
01. Kepulauan Mentawai	5,37	5,77	5,57	5,19	5,01
02. Pesisir Selatan	5,82	5,9	5,8	5,73	5,3
03. Solok	6,43	5,63	5,79	5,43	5,3
04. Sijunjung	6,15	6,14	6,02	5,68	5,25
05. Tanah Datar	5,61	5,85	5,79	5,31	5,01
06. Padang Pariaman	5,94	6,2	6,05	6,13	5,5
07. Agam	6,18	6,15	5,92	5,51	5,4
08. Lima Puluh Kota	6,15	6,23	5,98	5,58	5,31
09. Pasaman	6,01	5,82	5,87	5,33	5,06
10. Solok Selatan	6,04	6,13	5,9	5,35	5,11
11. Dharmasraya	6,19	6,51	6,34	5,75	5,39
12. Pasaman Barat	6,33	6,4	6,04	5,69	5,32
<b>Kota</b>					
01. Padang	6,16	6,66	6,46	6,39	6,21
02. Solok	6,76	6,44	6,01	5,97	5,75
03. Sawahlunto	5,53	6,11	6,08	6,02	5,71
04. Padang Panjang	5,97	6,29	6,08	5,91	5,79
05. Bukittinggi	6,55	6,28	6,2	6,12	6,04
06. Payakumbuh	6,62	6,56	6,47	6,19	6,08
07. Pariaman	6,13	6,06	5,99	5,78	5,58
<b>Mean</b>	6,10	6,16	6,02	5,74	5,48

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2012-2016*

Tabel 1 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat selama tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2013 sampai 2016 di kabupaten/kota Sumatera Barat, hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya masalah krisis keuangan global yang berdampak pada negara berkembang terutama Indonesia secara umum dan Provinsi Sumatera Barat secara khusus. Perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di kota Padang dengan nilai 6,21 persen pada tahun 2016 lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 6,39 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi terendah berada di kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 5,01 persen tahun 2016 lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 5,19 persen pada tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai disebabkan penurunan tingkat daya beli masyarakat yang berdampak pada perlambatan tingkat konsumsi rumah tangga.

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, hal ini berlawanan dengan seluruh kota yang pertumbuhannya berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, hal ini di karenakan tidak seimbangnya pembangunan yang ada di kabupaten dengan yang ada di kota. Kota Padang yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 merupakan ibu

kota dari Provinsi Sumatera Barat sehingga pembangunan infrastruktur maupun fasilitas, investasi dan kegiatan ekonomi lebih terpusat di Kota Padang sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kota Padang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Sumatera Barat. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah berada di Kepulauan Mentawai dikarenakan belum optimalnya pembangunan dan fasilitas ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di daerah tersebut.

Berdasarkan pandangan teori basis ekonomi (*economic base theory*) laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas sektor basis (dasar) dan sektor nonbasis, sektor basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan sektor nonbasis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri (Tarigan, 2005).

Seiring dengan era otonomi daerah, maka wewenang dari pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengatur dan merencanakan pembangunan di daerah masing-masing, hal tersebut juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memperluas kesempatan kerja di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektorsal, dengan

perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah akan ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah dan makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab (Joan dan Dewi, 2008).

**Tabel 2 Analisis LQ Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan									Jumlah Sektor Basis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kabupaten										
01. Kepulauan Mentawai	X				X					2
02. Pesisir Selatan	X				X					2
03. Solok	X	X								2
04. Sijunjung	X	X			X					3
05. Tanah Datar	X		X		X					3
06. Padang Pariaman		X	X				X			3
07. Agam	X		X			X				3
08. Lima Puluh Kota	X	X								2
09. Pasaman	X									1
10. Solok Selatan	X	X			X	X				4
11. Dharmasraya	X	X			X					3
12. Pasaman Barat	X		X							2
Kota										
01. Padang			X	X	X	X	X	X	X	7
02. Solok					X	X	X	X	X	5
03. Sawahlunto		X	X	X	X	X		X	X	7
04. Padang Panjang			X		X	X	X	X	X	6
05. Bukittinggi				X		X	X	X	X	5
06. Payakumbuh					X	X	X	X	X	5
07. Pariaman					X	X	X	X	X	5

Sumber : Hasil Analisis LQ Per Sektor

Keterangan : 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Gas, Air Minum  
5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Pengangkutan 8. Keuangan 9. Jasa-jasa

Berdasarkan Tabel 2 sektor pertanian merupakan sektor basis pada seluruh daerah kabupaten di Sumatera Barat yang berjumlah 12 kabupaten dan hanya kabupaten Padang Pariaman yang tidak memiliki sektor basis di bidang pertanian. Berdasarkan Tabel ada 11 kabupaten yang memiliki jumlah sektor basis dibawah rata-rata sektor basis Provinsi Sumatera Barat. Sektor basis terendah pada tahun 2016 berada pada kabupaten Pasaman yang memiliki satu sektor basis pada sektor pertanian. Rendahnya sektor basis di daerah kabupaten Sumatera Barat dikarenakan belum optimalnya pengembangan potensi daerah pada sektor-sektor potensial lainnya, daerah kabupaten masih memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor basisnya.

Sektor basis yang hanya dimiliki oleh daerah perkotaan di Sumatera Barat dan tidak dimiliki oleh daerah kabupaten adalah sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa. Sektor basis tertinggi pada tahun 2016 dimiliki kota Padang dan kota Sawahlunto dengan sektor basis pada sektor industri, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Banyaknya sektor basis yang dimiliki daerah perkotaan menjadikan daerah perkotaan pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Permasalahan di kabupaten/kota Sumatera Barat saat ini adalah sumber daya alam yang melimpah tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang potensial dan efektif dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga masih banyak kegiatan ekonomi yang memerlukan pengelolaan secara optimal dan terintegrasi, yang nantinya secara efektif mampu menunjang pembangunan di

Provinsi Sumatera Barat. Diantara sektor yang perlu diperhatikan adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut dan industri rumah tangga.

Dapat diasumsikan bahwa basis ekonomi perlu di kembangkan di sebuah wilayah agar meningkatkan kemampuan berproduksi dan menjual hasil produksi secara efisien dan efektif. Pentingnya di tetapkan komoditas unggulan di suatu daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas sumberdaya (alam, modal, dan manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu daerah relatif terbatas. Komoditas-komoditas yang diusahakan secara efisien akan mampu bersaing secara berkelanjutan, sehingga penetapan komoditas unggulan menjadi keharusan agar sumberdaya pembangunan di suatu daerah lebih terfokus. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang layak dikembangkan, maka penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat diharapkan lebih terarah sehingga merangsang terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Hubungan investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya, ini dikarenakan investasi pemerintah merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan maka akan terjadi peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan, produktivitas dan distribusi pendapatan. Dalam teori klasik dengan model pertumbuhan Harrod-Domar, untuk memicu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang

merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (Jhingan, 2012).

Dengan adanya Investasi pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam APBN (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*) sedangkan masyarakat diuntungkan dengan tersediannya lowongan pekerjaan. Semakin banyak investor dalam negeri maupun asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, itu berarti dalam sektor industri mengalami pertumbuhan. Sehingga semakin luas kesempatan kerja yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Permasalahan investasi yang terjadi di kabupaten/kota Sumatera Barat saat ini adalah masalah ketimpangan antara investasi daerah kabupaten dengan daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena perbedaan geografi dan potensi ekonomi antar wilayah di kabupaten/kota Sumatera Barat. Daerah perkotaan memiliki potensi ekonomi yang cepat berkembang di bidang perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa-jasa dibandingkan daerah kabupaten yang lebih memprioritaskan sektor pertanian. Sehingga daerah perkotaan memperoleh investasi yang lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dibandingkan daerah kabupaten.

Investasi pemerintah berupa belanja modal di kabupaten/kota Sumatera Barat pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3 :

**Tabel 3 Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat  
Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Kabupaten</b>					
01. Kepulauan Mentawai	219.854	255.917	255.390	302.716	359.471
02. Pesisir Selatan	133.684	155.931	184.283	331.838	344.346
03. Solok	116.914	140.568	164.944	161.267	223.791
04. Sijunjung	119.960	167.294	159.498	167.841	251.403
05. Tanah Datar	115.052	125.149	125.050	134.702	214.946
06. Padang Pariaman	137.505	135.363	201.821	215.080	276.485
07. Agam	139.796	175.877	159.344	150.569	215.991
08. Lima Puluh Kota	133.013	174.143	202.706	189.869	268.109
09. Pasaman	142.255	166.799	165.195	181.130	267.582
10. Solok Selatan	178.510	193.935	208.365	220.203	276.188
11. Dharmasraya	145.605	181.711	204.038	230.984	279.410
12. Pasaman Barat	138.502	180.824	200.298	203.034	312.030
<b>Kota</b>					
01. Padang	312.362	313.502	413.789	347.763	543.111
02. Solok	116.972	82.762	100.216	111.933	167.770
03. Sawahlunto	109.047	72.358	105.513	135.382	197.076
04. Padang Panjang	76.799	95.496	129.295	150.497	269.079
05. Bukittinggi	77.959	90.079	98.348	93.814	70.641
06. Payakumbuh	70.624	88.836	119.826	166.210	190.138
07. Pariaman	92.238	121.330	141.853	162.037	223.071
<b>Mean</b>	<b>135.613</b>	<b>153.572</b>	<b>175.777</b>	<b>192.467</b>	<b>260.560</b>

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012-2016*

Tabel 3 memperlihatkan investasi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2012 sampai 2016 terjadi peningkatan signifikan hal ini terlihat dari rata-rata investasi di kabupaten/kota Sumatera Barat di tahun 2012 sebesar 135.613 juta rupiah dan meningkat sampai tahun 2016 sebesar 260.560 juta rupiah. Peningkatan ini disebabkan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kabupaten/kota yang memiliki investasi di atas rata-rata investasi provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah kabupaten Pesisir

Selatan, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Pasaman, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Dharmasraya, kabupaten Pasaman Barat, kota Padang, dan kota Padang Panjang.

Investasi tertinggi pada tahun 2016 di peroleh Kota Padang sebesar 543.111 juta rupiah, sedangkan investasi terendah pada tahun 2016 di miliki oleh Kota Bukittinggi sebesar 70.641 juta rupiah. Kota Padang mendapat investasi yang sangat tinggi dikarenakan kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat sehingga dana belanja modal yang diterima lebih banyak dibandingkan daerah lain untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi terendah di kota Bukittinggi disebabkan tidak adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan dikarenakan banyaknya kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadikan investasi yang diterima kota Bukittinggi rendah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang kemudian akan meningkatkan perdanapannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula pada pendapatan nasional negara yang kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat (Jhingan, 2012).

Di antara berbagai aspek, pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Dari berbagai studi dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan ketampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas.

Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, jika produktivitas kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Dimana salah satu indikator untuk menggambarkan pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas.

**Tabel 4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 (dalam tahun)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Kabupaten</b>					
01. Kepulauan Mentawai	6,16	6,17	6,19	6,27	6,52
02. Pesisir Selatan	7,79	8,05	8,10	8,11	8,12
03. Solok	7,44	7,53	7,56	7,57	7,58
04. Sijunjung	7,20	7,30	7,32	7,33	7,50
05. Tanah Datar	7,63	7,78	7,80	7,93	8,12
06. Padang Pariaman	6,77	6,86	6,88	6,89	7,00
07. Agam	7,91	8,09	8,10	8,17	8,18
08. Lima Puluh Kota	7,52	7,58	7,59	7,91	7,92
09. Pasaman	7,48	7,60	7,62	7,63	7,64
10. Solok Selatan	7,44	7,80	7,97	7,98	7,99
11. Dharmasraya	7,88	7,94	7,99	8,03	8,23
12. Pasaman Barat	7,39	7,50	7,53	7,83	7,84
<b>Kota</b>					
01. Padang	10,75	10,89	10,93	10,97	11,24
02. Solok	10,35	10,72	10,75	10,77	10,79
03. Sawahlunto	9,32	9,45	9,65	9,66	9,92
04. Padang Panjang	10,36	10,53	10,79	11,09	11,42
05. Bukittinggi	10,62	10,66	10,71	10,79	10,98
06. Payakumbuh	9,83	9,93	9,96	10,29	10,30
07. Pariaman	9,32	9,88	9,94	9,96	10,09
<b>Mean</b>	<b>8,38</b>	<b>8,54</b>	<b>8,60</b>	<b>8,69</b>	<b>8,81</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2012-2016*

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pendidikan masing-masing wilayah yang ada di 19 kabupaten/kota Sumatera Barat yang diukur melalui angka rata-rata lama sekolah cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di kota Padang, kota Solok, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi, kota Payakumbuh, dan kota Pariaman yaitu dengan rata-rata lama sekolah 10 tahun perdaerah. Hal ini berarti bahwa penduduk di wilayah tersebut telah memenuhi wajib belajar 9 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk kota tersebut telah memiliki pendidikan yang tinggi.

Sementara wilayah dengan rata-rata lama sekolah terendah berada di kabupaten kepulauan Mentawai yaitu dengan lama sekolah 6,16 tahun pada 2012 dan meningkat menjadi 6,52 di tahun 2016 diikuti oleh kabupaten Padang Pariaman dengan rata-rata lama sekolah 6,77 di tahun 2012 dan meningkat di tahun berikutnya tahun 2016 menjadi 7 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk daerah Mentawai dan Padang Pariaman tidak menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan berpendidikan rendah karena hampir sebagian besar penduduknya hanya lulusan sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu wilayah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan di suatu wilayah maka semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas peneliti mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh basis ekonomi, investasi pemerintah, dan pendidikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga peneliti memilih judul penelitian “**Analisis Basis Ekonomi, Investasi Pemerintah dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh basis ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?

2. Sejauhmana pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh Basis ekonomi, Investasi Pemerintah, Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat :

1. Pengaruh Basis Ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
2. Pengaruh Investasi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Pengaruh Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Pengaruh Basis Ekonomi, Investasi Pemerintah, Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis Sendiri
  - a) Penulis akan mendapatkan gambaran mengenai pengaruh Basis ekonomi, Investasi Pemerintah, dan Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
  - b) Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana

## 2. Bagi Pihak Universitas

Dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya

## 3. Bagi Pemerintah

a. Bahan masukan bagi pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk pengambilan keputusan atau kebijaksanaan pembangunan dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi.

b. Pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, bilamana dianggap perlu.

## 4. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang menilik tentang pertumbuhan ekonomi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berarti adanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal disuatu negara. Seperti jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur dan penambahan produksi lainnya (Sukirno, 2002).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto, atau pendapatan atau output perkapita (Nanga, 2001).

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Oleh sebab ini pertumbuhan ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan output

suatu negara dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Todaro, 2003).

Output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian bergantung pada kuantitas input yang tersedia, seperti kapital dan tenaga kerja, produktifitas dari input tersebut. Hubungan diantara output dan input dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi sebagai berikut (Nanga, 2001) :

$$Y = A F (K,N).....(1)$$

Dimana :

Y = total output,

K = jumlah capital,

N = jumlah tenaga kerja,

A = produktifitas

Berdasarkan teori neo klasik yang dikemukakan oleh Robert M.Sollow dan T.W Swan (Tarigan, 2005), Sollow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Sollow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Pandangan ini dapat ditulis secara matematis sebagai berikut :

$$\Delta Y = f (\Delta K, \Delta L, \Delta T.....(2)$$

Dimana :

$\Delta Y$  = tingkat pertumbuhan ekonomi

$\Delta K$  = tingkat pertumbuhan modal

$\Delta L$  = tingkat pertumbuhan penduduk

$\Delta T$  = tingkat pertumbuhan teknologi

Dalam analisa neo klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu lainnya dalam suatu negara. Dengan demikian, pada hakekatnya tidak berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang juga berpendapat bahwa perkembangan faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan neo klasik pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independent yaitu teknologi kedalam persamaan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003). Lebih lanjut teori pertumbuhan ekonomi ini menyatakan bahwa pertumbuhan output selalu bersumber dari tiga faktor yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui penambahan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi baik investasi dalam negeri maupun asing) serta penyempurnaan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah struktur ekonomi terjadi atau tidak. Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah

berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 2004).

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi bangsa bergeser ke luar. Konsep yang berkaitan erat adalah tingkat pertumbuhan output per orang. Ini menentukan tingkat ketika standar-standar hidup negara naik. Negara-negara terutama menaruh perhatian pada pertumbuhan output perkapita karena menyebabkan peningkatan rata-rata pendapatan. Pertumbuhan ekonomi meliputi pertumbuhan output potensial pada jangka panjang. Pertumbuhan output per kapita merupakan sasaran penting pemerintah karena berkaitan dengan peningkatan rata-rata riil pendapatan dan standar-standar hidup (Samuelson, 2003).

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka memisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya

dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh penambahan penduduk kepada tingkat produksi dan pendapatan (Sukirno, 2002).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Proses kenaikan output mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan.

Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ( $PDRB_t$ ) dengan PDRB sebelumnya ( $PDRB_{t-1}$ ).

## **2. Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Tarigan, 2005). Dalam penjelasan selanjutnya

dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Ada serangkaian teori ekonomi yang berusaha menjelaskan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*Economic Base Theory*).

Menurut Glasson dalam Ghalib (2005), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:

- 1) Sektor-sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Sektor-sektor bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah

pasar terutama adalah bersifat lokal.

Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat dimana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis disuatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional. Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lain yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Tarigan, 2005).

Analisis basis menggunakan rumus yang sangat sederhana padahal analisis ini cukup ampuh untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan

ekonomi wilayah. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuesien lokasi (*Loqation Quotient*). *Loqation Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor–sektor basis atau unggulan. Dalam teknik LQ berbagai faktor dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan produk domestik regional bruto suatu wilayah (Tarigan, 2005).

Metode *Loqation Quotient* (LQ) yang umum di pakai oleh pakar-pakar ekonomi dalam menentukan sektor basis. Model analisis *Loqation Quotient* (LQ) dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{-----} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

LQ : Nilai *Loqation Quotient*

Y<sub>i.k</sub> : Nilai tambah sektor i di Kabupaten / Kota

Y<sub>k</sub> : Total PDRB di Kabupaten / Kota

Y<sub>i.p</sub> : Nilai tambah sektor i di Provinsi

Y<sub>p</sub> : Total PDRB di Provinsi

Teknik analisis *Loqation Quotient* (LQ) ini memiliki kelemahan dan keunggulan, kelemahan teknik analisis *Location Quotient* (LQ) ini yaitu bahwa asumsi pola permintaan daerah dan nasional adalah identik, produktivitas tenaga kerja di daerah dan nasional adalah identik. Sementara keunggulan teknik analisis ini adalah *Loqation Quotient* (LQ)

mempertimbangkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung, biayanya murah dan dapat di terapkan pada data historik untuk mengetahui trend (Tarigan, 2005).

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan basis ekonomi. Teori basis ekonomi menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat tidak tergantung pada kekuatan internal /permintaan lokal. Sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan penjelasan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu basis ekonomi sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005).

### 3. Investasi Pemerintah

Investasi secara umum berasal dari kata penanaman modal, yang merupakan salah satu komponen untuk menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2002).

Investasi juga dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok capital (*capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal capital (*capital formation*). Dengan demikian, di dalam makroekonomi pengertian investasi atau akumulasi modal berbeda dengan modal (*capital*) (Nanga, 2001). Dengan adanya investasi dalam perekonomian, maka akan terjadi pertumbuhan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang telah ada karena membawa pengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Sebab dengan adanya investasi, terutama dalam penambahan tenaga kerja yang berarti penambahan pengeluaran perusahaan untuk membayar upah dan gaji dengan perubahan pendapatan akan menambah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi yang seiring dengan bertambahnya jumlah barang-barang yang ada dalam perekonomian.

Menurut Harrod-Domar (Arsyad, 2004), setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika

hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan material yang rusak). Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan modal. Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti luas. Investasi selalu dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang dalam proses produksi, dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kualitas sistem produk pada masa yang akan datang. Berdasarkan konsep pendapatan investasi adalah total pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok, baik itu barang setengah jadi maupun barang jadi.

Investasi pemerintah adalah pembelian, penambahan dan pembentukan barang modal serta perubahan stok oleh pemerintah yang menyelenggarakan Administrasi Umum (*General Administration*). Investasi pemerintah diartikan sebagai pengeluaran untuk keperluan pembangunan. Menurut Sukirno (2002), pengeluaran pemerintah dapat digolongkan pada dua golongan utama:

- 1) Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah pembelian terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti membayar gaji guru sekolah, dan alat-alat kantor dan lain-lain.
- 2) Investasi pemerintah adalah pengeluaran untuk membangun prasarana jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan untuk pembangunan ekonomi,

sehingga hasilnya dapat dirasakan secara keseluruhan dimana merupakan penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan semakin besar.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S.A dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum, dimana hukum Wagner sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Guritno, 2002).

Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (U.S.A, Jerman, Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan akan menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah

sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Guritno, 2002).

Investasi pemerintah dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan, melalui kebijakan membangun prasarana jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi, dan lain-lain. Disisi lain belanja pemerintah daerah berperan dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indra, 2016).

Dengan adanya investasi pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur ekonomi yang baik akan berpengaruh pada mudahnya akses industri dan mendapatkan modal yang cukup sehingga mampu memproduksi barang sesuai permintaan konsumen. Sedangkan masyarakat diuntungkan dengan tersediannya lowongan pekerjaan sehingga semakin luas kesempatan kerja bagi masyarakat, serta negara sedikit demi sedikit mampu mengurangi ketergantungannya terhadap negara lain dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah mempunyai peran yang mempengaruhi perekonomian, bentuk pengaruh pemerintah diterapkan pada kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi perekonomian, sebagian besar perekonomian harus

mengikuti kebijakan pemerintah dibandingkan diserahkan pada mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk membimbing, memberi koreksi, dan melengkapi hal tertentu dalam proses perekonomian sehingga akan meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah menuju ke arah yang lebih baik.

#### **4. Pendidikan**

Pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi karena itu, investasi dibidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial diantaranya pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan ketergantungan kesejahteraan yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Pendidikan adalah kunci dalam menciptakan, menyerap, dan menyebarkan

ilmu pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar merata dan golongan masyarakat miskin paling sedikit mendapat fasilitas pendidikan (Todaro, 2004).

Pendidikan merupakan investasi yang sangat berguna untuk membangun perekonomian. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. Tingkat pendidikan dan latihan yang dimiliki seorang tenaga kerja akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja tersebut (Sumarsono, 2003). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi.

Pendidikan formal dan non formal berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung yaitu dengan perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2004). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah investasi dan kesempatan

untuk berkompetisi guna mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan ikut serta dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pendidikan yang terprogram dengan baik dan menjangkau semua golongan, maka pendidikan akan menjadi instrument yang paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia.

Hubungan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan di perlukan waktu dan uang, akan tetapi pada masa yang akan datang pendidikan yang telah diperoleh masyarakat dan individu akan mendapatkan manfaat dari peningkatan taraf pendidikan. Dimana individu yang mendapatkan pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh (Sukirno, 2006). Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin rendah ketimpangan pendapatan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diperlukan untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan agar dapat diketahui pendapat atau hasil terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Dibawah ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan yaitu:

1. Ernita, Syofyan, Amar (2013) dalam penelitian tentang “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Komsumsi di Indonesia”, menyatakan bahwa secara parsial investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Triani (2006) dalam penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, menyatakan bahwa investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Ely (2011) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Joan dan Dewi (2008) dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat“, menyatakan bahwa sektor basis di tiap kabupaten/kota Sumatera barat sejak tahun 2006 sampai 2008 cenderung tetap, tidak banyak sektor yang mengalami perubahan dari sektor bukan basis ke sektor basis.

### **C. Kerangka Koseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan. Keterkaitan maupun

hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak dari teori yang dikemukakan di atas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya hubungan antara Basis Ekonomi ( $X_1$ ), Investasi Pemerintah ( $X_2$ ), Pendidikan ( $X_3$ ), sebagai variabel bebas dan Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) sebagai variabel terikat.

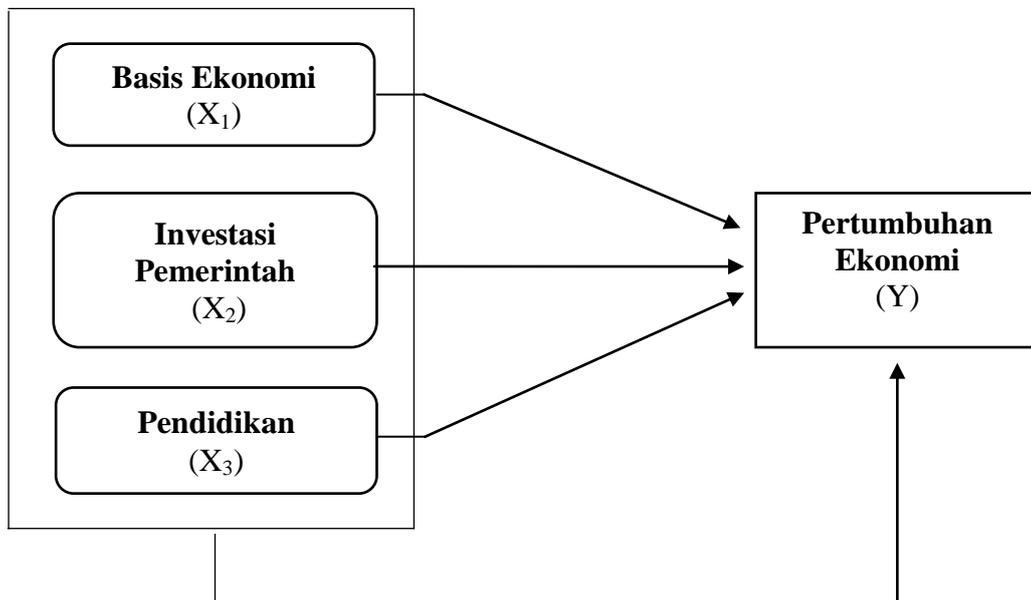
Basis ekonomi ( $X_1$ ), memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, dalam arti luas basis ekonomi merupakan sektor unggulan yang melayani pasar di dalam maupun di luar dan merupakan penggerak utama dalam perekonomian suatu wilayah. Dimana Basis ekonomi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ), apabila sektor ekonomi basis tersebut dikembangkan dengan baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga diduga bahwa basis ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi Pemerintah ( $X_2$ ), semua belanja modal pemerintah pada suatu periode anggaran. Dimana belanja modal pemerintah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ), jadi semakin tinggi belanja modal pemerintah di tiap-tiap daerah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebaliknya jika semakin rendah belanja modal pemerintah maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Sehingga diduga bahwa belanja modal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan ( $X_3$ ), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh tersebut adalah apabila tingkat pendidikan di Sumatera Barat tinggi maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan semakin tinggi, namun dalam situasi tertentu tingkat pendidikan dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ), yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang diukur dengan satuan persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengindikasikan kesejahteraan rakyat dalam daerah tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas ( $X$ ), basis ekonomi ( $X_1$ ), investasi pemerintah ( $X_2$ ), tingkat pendidikan ( $X_3$ ), terhadap ( $Y$ ) Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan pada kerangka konseptual berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual Pengaruh Basis Ekonomi, Investasi Pemerintah, Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Basis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat.

$$H_o : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomidi kabupaten/kota Sumatera barat.

$$H_o : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

4. Basis ekonomi, investasi pemerintah dan pendidikan secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 \neq 0$$

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini mengkaji pengaruh basis ekonomi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Variabel basis ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan koefisien sebesar 0,116612 dan dengan probabilitas sebesar 0,3732, variabel basis ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat. Koefisien positif artinya setiap peningkatan basis ekonomi akan menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi namun dampaknya tidak signifikan di kabupaten/kota Sumatera Barat.

Variabel investasi pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan nilai probabilitas investasi pemerintah adalah 0.0000, dan koefisien regresi -0.762752, artinya setiap peningkatan investasi pemerintah akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya semakin rendah investasi pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh permasalahan krusial yang dihadapi dalam melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi.

Secara bersama-sama variabel basis ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota

Sumatera Barat dengan nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,6737. Hal tersebut berarti 67,37 persen variasi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Sumatera Barat di jelaskan oleh variabel basis ekonomi dan investasi pemerintah secara bersama-sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana atau faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan sektor basis sehingga dapat menambah dan menjadikan sektor basis sebagai sektor unggulan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan investasi. Untuk itu pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan harusnya dapat mengevaluasi besarnya investasi di setiap daerah serta melakukan pemerataan terhadap investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tiap kab/kota di Sumatera Barat.
3. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan kebijakan untuk merangsang laju pertumbuhan ekonomi agar masyarakat semakin sejahtera dan mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat akan semakin berkurang seiring dengan meratanya pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Samuelson, dkk, 2003. “*Ilmu Makro Ekonomi*”. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik . *Sumatera Barat Dalam Angka 2012-2016*. BPS Sumatera Barat. Padang.
- Ernita. D, Syofyan.E dan Amar. S. 2013. *Jurnal Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Komsumsi di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. I, No. 02
- Dewi dan Joan. 2010. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi*. Vol. 10, No.2
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah, 2012-2016. *Laporan Realisasi Anggaran*. [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)
- Guritno. Mangkoesoebroto. 2002. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta
- Gujarati. Damodar. 2003. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Indra Jaya, Billy. 2016. *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Melalui Pendapatan Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta*. Malang.
- Jhinghan,M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma Retno, Ely. 2011. *Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Surabaya.
- Muhammad, Nasir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nanga, Muana. 2001. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rusli Ghalib.2005. *Ekonomi Regional*, Penerbit Pustaka Ramadhan : Bandung
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2001. *Macroeconomics*. Seventeenth Edition. McGraw-Hill Higher Education.